




PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Salotungo No.  (0484) 21091 Watansoppeng 90811

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 18/SK/DPMD/VIII/2017

T E N T A N G

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SOPPENG,

- Mengingat :
- a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng perlu disusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng;
 - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 - c. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 harus dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng Tahun 2017 dengan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng;
- Menimbang
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025.
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
-

23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
27. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017.**

Pasal 1.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun 2017.

Pasal 2.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng ini.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal : 30 Agustus 2017


KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SOPPENG
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.SI
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19710817 199101 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rakhmani Rahim,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2017 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bidang dan seksi serta usulan dari berbagai pihak. Perubahan Renja Tahun 2017 ini merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan renstra 2016 - 2021.

Perubahan Rencana kerja sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2018 serta untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga dengan tersusunnya Perubahan rencana kerja Tahun Anggaran 2017 ini dapat memberikan manfaat bagi institusi baik pemerintah, maupun masyarakat secara umum dan khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2018, serta acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr,Wb.

Watansoppeng, 30 Agustus 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SOPPENG



ANDI AGUS NONGKI, S.IP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19710817 199101 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul	
Halaman Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA (RENJA) SKPD	
TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	22
3.1. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	24
3.3. Program dan Kegiatan	25
BAB IV. PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada Triwulan IV tahun berkenaan. Perubahan Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Triwulan tahun berkenaan, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerinatahan daerah maupun yang ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Renja SKPD merupakan dokumen Rencana Resmi Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Perubahan Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena perubahan SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah daerah dan terkecil. Perubahan Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas Penyusunan Perubahan Renja SKPD sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada public.

Proses penyusunan Perubahan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Perubahan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaan rancangan awal RKPD, selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip – prinsip di dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Rumusan dalam program dan kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan pertimbangan pagu indikatif masing-masing SKPD.
3. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkasian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Perubahan Renja SKPD dengan Dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD, RKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renja-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng
21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017.
22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.
23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja-SKPD

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) tahun 2017 adalah :

1. untuk dijadikan dokumen perencanaan yang operasional untuk jangka periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan perundang yang berlaku, Renja-SKPD ini selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) Kabupaten Soppeng untuk Tahun anggaran 2017.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2017.
3. Sebagai dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai tolak ukur kinerja di setiap bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2017.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) tahun 2017 adalah :

1. menjabarkan Renstra SKPD dari masing-masing dinas dan instansi untuk 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2018 dengan turut pula mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015 dan 2016 sesuai dengan data yang tersedia. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Soppeng yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
4. Sebagai instrument untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Soppeng.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja-SKPD

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng tahun 2017 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Perubahan Renja SKPD, Proses penyusunan Perubahan Renja SKPD, dan Keterkaitan Perubahan Renja SKPD dengan RKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dan Renja SKPD , serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TRIWULAN KEDUA TAHUN 2017

Memuat tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD.
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 dan PP 38 Tahun 2007.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Menguraikan mengenai tingkat kinerja pelayanan SKPD serta permasalahan-permasalahan yang di hadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Menguraikan mengenai tentang perbandingan mengenai rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Menguraikan tentang hasil kajian program dan kegiatan dari pemangku kepentingan

III. TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
Penjelasan mengenai telaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta terkait dengan tupoksi SKPD
- 3.2. Tujuan dan sasaran Perubahan Renja SKPD
Menguraian rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan
Menguraikan mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

IV. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TRIWULAN KEDUA TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Triwulan II 2017 dan Capaian Renstra SKPD

Kinerja Output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indicator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan dalam upaya melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Triowulan II Tahun 2017, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.1.1. Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng dari total belanja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok Tahun 2017 sebesar **Rp. 3.348.897.047,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 1.680.897.047,-** (termasuk Gaji dan Tunjangan) dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.668.000.000,-** dengan capaian realisasi sebesar 45.51% dengan rincian realisasi sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 10 Kegiatan dan Jumlah Anggaran **Rp. 724.296.000,-** dapat terealisasi **Rp. 367.214.572,-** atau **50,70%** dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 64,16% hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya Kebutuhan Informasi di Kantor DPMD dengan anggaran Rp. 30.200.000,- Realisasi Rp. 19.374.921,-

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 0% baik dari segi realisasi fisik kegiatan maupun dari segi realisasi keuangan, dengan anggaran Rp. 2.750.000,- Realisasi Rp. 0,-

c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor.

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 41,67% hasil yang dicapai adalah Meningkatnya kebersihan Kantor dengan anggaran Rp. 14.400.000,- Realisasi Rp. 6.000.000,-

d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik.

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 24,69% hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya Penerangan Kantor lebih terang dan Pemakaian Fasilitas kantor tidak terhambat dengan anggaran Rp. 1.620.000,- Realisasi Rp. 400.000,-

- e. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan. Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 98,36% hasil yang dicapai adalah terciptanya pelayanan informasi melalui media cetak. dengan anggaran Rp. 7.000.000,- Realisasi Rp. 6.885.000,-
- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 25,00% hasil yang dicapai adalah terpenuhinya bahan logistik kantor. dengan anggaran Rp. 1.760.000,- Realisasi Rp.440.000,-
- g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 53,67% hasil yang dicapai adalah terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas PNS melalui perjalanan dinas. dengan anggaran Rp.383.150.000,- Realisasi Rp.205.623.151,-
- h. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 46,35% hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya ATK rutin dan kegiatan Makan dan Minum, Bahan Cetak & penggandaan serta Honorarium Pramu Bakti. dengan anggaran Rp.211.416.000,- Realisasi Rp.97.991.500,-
- i. Penyediaan Jasa Perkantoran
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 42,38% hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya ATK rutin dan kegiatan Makan dan Minum, Bahan Cetak & penggandaan serta Honorarium Pramu Bakti. dengan anggaran Rp.72.000.000,- Realisasi Rp.30.500.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 5 Kegiatan dan Jumlah Anggaran **Rp. 137.045.000,-** dapat terealisasi **Rp. 106.545.500,-** atau **77.74%** dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
Capaian kinerja pada kegiatan ini masing-masing mencapai 100% baik dari segi fisik kegiatan maupun keuangan. *Output* dari kegiatan ini adalah Pengadaan laptop 2 buah, printer 4 buah, mesin tik 2 buah dan AC 2 buah.. *Outcome* dari kegiatan ini adalah Tersedianya perlengkapan gedung kantor. dengan anggaran Rp.48.500.000,- Realisasi Rp.48.500.000,-Capaian kinerja pada kegiatan ini masing-masing mencapai 100% baik dari segi fisik kegiatan maupun keuangan..
- b. Pengadaan Meubeleur.
Capaian kinerja pada kegiatan ini masing-masing mencapai 100% baik dari segi fisik kegiatan maupun
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 35,30% hasil yang dicapai adalah Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 dan Roda 2. dengan anggaran Rp.41.945.000,- Realisasi Rp.14.805.500,-

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 47,24%, hasil yang dicapai adalah Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor, dengan anggaran Rp.5.800.000,- Realisasi Rp. 2.740.000,-

3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Anggaran sebesar **Rp. 40.000.000,-** dapat terealisasi **Rp. 15.610.000,-** atau **39,03%** dengan kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan.

4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.**

Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan, 3 Kegiatan dengan Anggaran sebesar **Rp. 14.900.000,-** dapat terealisasi **Rp. 2.350.000,-** atau **15,77%** dengan implementasi kegiatan adalah:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD hasil yang dicapai adalah tersusunnya RKA, DPA, Renja, Lakip, LPPD dan LKPJ. dengan anggaran Rp.7.250.000,- Realisasi Rp. 2.350.000,-
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, hasil yang dicapai adalah tersedianya Laporan Keuangan Semesteran. dengan anggaran Rp.3.850.000,- Realisasi Rp. 0,-
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, hasil yang dicapai Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun antara lain LRA, NERACA, LO, NERACA dan CALK SKPD. dengan anggaran Rp.3.800.000,- Realisasi Rp. 0.00,-

b. **Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan masyarakat Pedesaan.**

Terlaksananya Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 5 Kegiatan dengan Anggaran sebesar **Rp.334.746.000,-** dapat terealisasi **Rp. 87.485.000,-** atau **26,13%** dengan implementasi kegiatan adalah :

- a. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
Capaian kinerja pada kegiatan ini masing-masing mencapai 96,80% baik dari segi fisik kegiatan maupun keuangan hasil yang dicapai adalah meningkatnya Gizi Anak Sekolah sebanyak 200 Anak/Murid yang kurang mampu. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya Gizi Anak Sekolah. dengan anggaran Rp.25.595.000,- Realisasi Rp. 24.775.000,-
- b. Pembinaan Evaluasi dan monitoring Baruga Sayang.
Capaian kinerja pada kegiatan ini masing-masing mencapai 8,37% baik dari segi fisik kegiatan maupun keuangan hasil yang dicapai adalah Pemanfaatan Baruga Sayang secara maksimal. dengan anggaran Rp. 14.030.000,- Realisasi Rp. 1.175.000,-
- c. Fasilitasi 10 Program PKK
Capaian kinerja pada kegiatan ini mencapai 0%, belum ada hasil yang dicapai dengan anggaran Rp.74.750.000,- Realisasi Rp. 0,-

- d. **Pencanangan/penutupan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.**
Capaian kinerja pada kegiatan ini masing-masing mencapai 0% baik dari segi fisik kegiatan maupun keuangan. Belum ada hasil yang dicapai dengan anggaran Rp. 21.326.000,- Realisasi Rp.0,-
- e. **Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP).**
Capaian kinerja pada kegiatan ini masing-masing mencapai 87,37% baik dari segi fisik kegiatan maupun keuangan hasil yang dicapai adalah Terwujudnya PPSP Desa Kelurahan. dengan anggaran Rp. 2.375.000,- Realisasi Rp. 2.075.000,-
- f. **Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pedesaan.**
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 30,23% dari segi realisasi fisik kegiatan dan 82% dari segi realisasi keuangan hasil yang dicapai adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kel. dengan anggaran Rp. 196.670.000,- Realisasi Rp. 59.460.000,-
- c. **Program Perencanaan Pembangunan Desa.**
Terlaksananya Program Program Perencanaan Pembangunan Desa 3 Kegiatan dengan Anggaran sebesar **Rp. 89.085.000,-** dapat terealisasi **Rp. 49.962.000,-** atau **72.32%** dengan implementasi kegiatan adalah :
1. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 0% dari segi realisasi fisik kegiatan dan realisasi keuangan dengan anggaran Rp.3.250.000,- Realisasi Rp,-
 2. Fasilitasi Penyusunan RKPDesa dan APBDesa.
Capaian kinerja pada kegiatan ini masing-masing mencapai 83,43% baik dari segi fisik kegiatan maupun keuangan hasil yang dicapai adalah dengan anggaran Rp. 59.885.000,- Realisasi Rp. 49.962.000,-
 3. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel.
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 0% dari segi realisasi fisik kegiatan dan dari segi realisasi keuangan, dengan anggaran Rp. 5.950.000,- Realisasi Rp.0,-
- d. **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.**
Terlaksananya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 4 Kegiatan dengan Anggaran sebesar **Rp. 125.846.000,-** dapat terealisasi **Rp. 76.681.500,-** atau **60.93%** dengan implementasi kegiatan adalah :
1. Pembinaan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 72,59% dari segi realisasi fisik kegiatan dan realisasi keuangan dengan anggaran Rp.75.976.000,- Realisasi Rp. 55.148.000,-
 2. Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2).
Capaian kinerja pada kegiatan ini masing-masing mencapai 29,17% baik dari segi fisik kegiatan maupun keuangan hasil yang dicapai adalah Meningkatkan pembinaan pelayanan/penagihan ke Kelompok P2M2 di 8 Kecamatan dengan anggaran Rp. 2.960.000,- Realisasi Rp. 863.500,-

3. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa ttg BUMDES.

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 78,71% dari segi realisasi fisik kegiatan dan dari segi realisasi keuangan hasil yang dicapai adalah terfasilitasinya penyusunan perdes tentang Bumdes. dengan anggaran Rp. 26.260.000,- Realisasi Rp. 20.670.000,-

4. Pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 0% belum ada yang hasil yang terealisasi dengan anggaran Rp. 26.260.000,- Realisasi Rp. 0,-

e. **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.**

Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 8 Kegiatan dengan Anggaran sebesar **Rp. 222.082.000,-** dapat terealisasi **Rp. 145.102.000,-** atau **65,34%** dengan implementasi kegiatan adalah :

1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa.

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% dari segi realisasi fisik kegiatan dan 100% dari segi realisasi keuangan hasil yang dicapai adalah pengelolaan Keuangan Desa yang baik. dengan anggaran Rp. 79.950.000,- Realisasi Rp. 79.950.000,-

2. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitai Pengelolaan Dana ADD/DAD.

Capaian kinerja pada kegiatan ini masing-masing mencapai 64,10% baik dari segi fisik kegiatan maupun keuangan hasil yang dicapai adalah hasil yang dicapai adalah tertib pengelolaan Keuangan Desa. dengan anggaran Rp. 45.540.000,- Realisasi Rp. 29.190.000,-

3. Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan BPD.

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% dari segi realisasi fisik kegiatan dan 94% dari segi realisasi keuangan hasil yang dicapai adalah PAW kepala desa dan terbentuknya BPD. dengan anggaran Rp. 3.725.000,- Realisasi Rp. 3.725.000,-

4. Fasilitasi Penyusunan APBDesa.

Capaian kinerja pada kegiatan ini masing-masing mencapai 100% baik dari segi fisik kegiatan maupun keuangan hasil yang dicapai adalah Tersedianya APBDesa disemua Desa dengan anggaran Rp. 12.025.000,- Realisasi Rp. 12.025.000,-

5. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa tentang Desa.

Capaian kinerja pada kegiatan ini masing-masing mencapai 100% baik dari segi fisik kegiatan maupun keuangan hasil yang dicapai adalah Tersedianya APBDesa disemua Desa dengan anggaran Rp. 12.025.000,- Realisasi Rp. 12.025.000,-

6. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa tentang Desa.

Penyusunan Produk-produk Hukum yang terkait dengan Desa

Capaian kinerja pada kegiatan ini masing-masing mencapai 28,58% baik dari segi fisik kegiatan maupun keuangan hasil yang dicapai adalah tersedianya produk hukum yang mengatur pemerintahan Desa. dengan anggaran Rp. 13.777.000,- Realisasi Rp. 3.937.000,-

7. Penyusunan Produk Hukum terkait dengan Desa

Capaian kinerja pada kegiatan ini masing-masing mencapai 24,27% baik dari segi fisik kegiatan maupun keuangan hasil yang dicapai adalah tersedianya produk hukum yang mengatur pemerintahan Desa. dengan anggaran Rp. 67.065.000,- Realisasi Rp. 16.275.000,-

2.1.2. Faktor-faktor Penyebab

a. Faktor-faktor Penyebab tercapainya target

Faktor – Faktor Penyebab terpenuhinya program dan kegiatan yang mencapai target karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

b. Faktor – faktor penyebab program dan kegiatan yang tidak mencapai target

Untuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan berakhirnya periode tahun anggaran atau awal tahun 2017 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah faktor penghambat pencapaian target, yaitu :

- * Tahun 2016 merupakan tahun pertama kepemimpinan bupati untuk periode 2016-2021 dan pelaksanaan perdana renstra periode 2016-2021 sehingga masih memerlukan berbagai macam penyesuaian pada awal tahun anggaran.
- * Tahun 2017 adanya pembentukan susunan perangkat daerah yang baru sehingga menjadikan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berganti menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga terjadi beberapa perubahan susunan bidang dan seksi yang memerlukan penyesuaian SDM terhadap tupoksi yang baru dan wewenang yang lebih luas.
- * Perencanaan Kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi).
- * Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.1.3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan Kinerja Pelayanan SKPD

Dikarenakan terdapat beberapa program kegiatan yang hingga awal tahun 2017 tidak didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai sehingga target capaian kegiatan tidak mencapai 100% dari yang direncanakan sehingga berimplikasi terhadap tidak tercapainya target capaian renstra SKPD 2016 - 2021 di awal tahun pertama pelaksanaan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan tidak tercapainya target capaian renstra SKPD 2016 - 2021 sesuai yang direncanakan di tahun pertama pelaksanaan mengakibatkan penambahan target pada tahun anggaran 2018 dan penyesuaian target capaian pada renstra 2016 - 2021.

2.1.4. Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program / kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

- * Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2018 dan renstra 2016-2021.
- * Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan.
- * Efisiensi alokasi belanja.
- * Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.

Berikut **Tabel 2.1** mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Soppeng, sejauh mana target kinerja dan capaian triwulan II tahun Tahun 2017 serta rencana target kinerja capaian Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan masyarakat Dan Desa Kabupaten Soppeng ditahun 2017 adalah sebagai berikut :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Soppeng yang berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan melalui Perjanjian Kinerja yang telah dibuat bersama, serta rencana capaian IKK (Indicator Kinerja Kunci) sesuai dengan isian amanat Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Soppeng.

Berikut **Tabel 2.2** mengenai capaian kinerja dan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut ;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, maka Pemerintah Daerah memerlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dalam merumuskan, mendesain dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah kedalam pola organisasi pemerintah daerah. dengan organisasi pemerintah kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dan sebagai proses interaksi antara pemerintah institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Soppeng.

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Soppeng pada Rencana Kerja (Renja) Tahun Rencana 2018 aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Soppeng meliputi ;

1. Kepala Dinas 1 orang.
2. Sekretaris Dinas 1 orang.
3. Kasubbag Sekretariat 2 orang.
4. Kepala Bidang Teknis 2 orang.
5. Kepala Seksi teknis 6 orang.
6. Fungsional Umum 11 orang

Selain dari pada itu pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Soppeng Tahun 2018 semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang melayani keperluan masyarakat desa dan aparatur Pemerintahan Desa secara riil, baik di lapangan maupun di kantor, dengan ditunjang oleh Teanaga PHTL yang ada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng adalah sebanyak 28 orang.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Soppeng. Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi.

1. Pemerintahan Desa :

- a. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan yang terkait. Akibatnya, Undang-Undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal.

- b. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa. Hal ini mengakibatkan kinerja para aparatur dan kelembagaan tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat.
- c. Belum optimalnya ketersediaan data Profil Desa di Desa/Kelurahan sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa. Ketersediaan data Profil Desa sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pusat,Provinsi,Kabupaten/Kota).
- d. Belum maksimalnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang kreatif, inovatif dan berkualitas
 Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat agar terjadi kondisi masyarakat yang aman, nyaman tertib serta adanya kepastian hukum, Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan aparatur yang professional, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.

2. Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

:

- a. Belum optimalnya kinerja aparat pemerintah kabupaten terkait pembinaan adat budaya lokal setempat, serta belum adanya penetapan Desa Adat,
- b. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun;
- c. Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat dan sosial budaya dalam partisipasi pembangunan perdesaan belum optimal.

3. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Teknologi Tepat Guna :

- a. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif;
- b. Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.

- c. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal begitu pula sarana perdesaan belum ditata secara baik sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal sumber daya alam dan sarana prasarana yang dimiliki tersebut;
- d. Penyebarluasan Teknologi Perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa.
- Peningkatan jumlah kelompok usaha simpan pinjam.
- Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa.
- Peningkatan Kemandirian Masyarakat di Desa.
- Peningkatan Lembaga dan organisasi yang ada di desa
- Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa).
- Peningkatan inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa

2.3.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng.

Secara umum lemahnya partisipasi masyarakat, mudahnya kearifan dan nilai-nilai lokal yang mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat, antara lain disebabkan oleh :

- a. Proses pembentukan kelembagaan di perdesaan memiliki ciri yang sama, yakni dibentuk dari "atas." Kelembagaan yang dibentuk umumnya lebih berorientasi pada legalitas dan bukan legitimasi yang tidak perlu mempertimbangkan dukungan masyarakat dan pada sisi lain lembaga yang dibentuk biasanya menyertakan pejabat publik sebagai pelindung dan mempunyai hak veto.
- b. Struktur kelembagaan yang dibentuk umumnya berbentuk hirarki, dengan sedikit memberikan ruang untuk berlangsungnya partisipasi masyarakat. Kekuasaan umumnya terpusat pada pemegang jabatan tertinggi yang justru dipihak pelindung yang pada umumnya dipegang oleh pejabat publik.
- c. Aspek formal dan legalitas mengalahkan nilai-nilai kearifan lokal yang selanjutnya mengakibatkan pendekatan dalam penyelesaian masalah-masalah selalu didasarkan kepada aspek legalitas dan hukum dan bukan berdasarkan hasil pertimbangan musyawarah, nilai, norma ataupun kearifan lokal yang sudah mengakar di masyarakat selama ini.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi kelembagaan masyarakat Soppeng saat ini belum cukup berdaya sebagai wadah yang menyajikan pilihan-pilihan (*choices*) bagi warganya untuk berbagai aspek kehidupan.

Begitu pula kelembagaan masyarakat belum cukup berdaya dalam memfasilitasi tersuarakannya aspirasi (*voices*) dalam berbagai aspek kehidupan dari warga masyarakat. Kondisi ini, selain disebabkan oleh proses modernisasi dan praktek pembangunan yang selama ini cenderung mengkondisikan pelemahan daya kemampuan (*capability deprivation*) atas kelembagaan masyarakat, juga sangat terkait dengan lambatnya proses penguatan wawasan bagi terkuatkannya *techno-structure* maupun *soft-structure* masyarakat yang *adaptif-kreatif* dalam merespon dinamika perubahan. Kondisi ini menuntut agenda pemberdayaan masyarakat yang serius bagi terkuatkannya entitas Soppeng kedepan.

A. Tantangan

Dalam pengembangan fungsi pelayanannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat menjadi tantangan dalam rangka peningkatan kinerja berupa optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Tantangan tersebut meliputi :

- a. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut.
- b. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistik dan individualistik,
- c. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi prilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat,
- d. Kecenderungan heterogenitas tatanan sosial masyarakat,
- e. Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat lokal,
- f. Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.
- g. Tuntutan ketersediaan Data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat.

B. Peluang

Selain tantangan tersebut di atas, terdapat pula peluang-peluang antara lain :

- a. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat,

- b. Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi salah satu pilar otonomi daerah dan merupakan urusan wajib Kabupaten Soppeng,
- c. Adanya komitmen pemerintah pusat terhadap program percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia,
- d. Posisi Soppeng sebagai jalur tujuan wisata di Sulawesi Selatan.
- e. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021.

DPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada DPMD Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman).

Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1) Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- 2) Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
- 3) Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
- 4) Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
- 5) Tersedianya anggaran.

KELEMAHAN (W):

- 1) Terlalu berorientasi pada anggaran;
- 2) Belum tersedianya sistem informasi data;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- 1) Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- 2) Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- 3) Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
- 4) Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- 5) Adanya program-program bantuan dari propinsi dan pusat;
- 6) Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

ANCAMAN (T):

- 1) Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;
- 3) Besarnya jumlah keluarga miskin;
- 4) Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;
- 5) Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai.
- 6) Masih ada desa yang berpotensi rendah.

2.3.5. Formulasi Isu-isu penting

Berdasarkan identifikasi permasalahan, Dampak terhadap visi-misi Kepala Daerah peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan SKPD, maka isu-isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan Kabupaten Soppeng sesuai prioritas tiap bidang dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintahan Desa adalah menjadi isu yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Hal ini dikarenakan sebagian besar tingkat pendidikan aparatur Pemerintahan Desa se Kabupaten Soppeng masih rendah dan kurangnya pemahaman mengenai peraturan – peraturan baru baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Melihat dari kenyataan ini maka Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengalokasikan anggaran setiap tahunnya untuk memberikan melaksanakan pelatihan, sosialisasi, pembinaan dan monitoring bagi aparatur Pemerintahan Desa se Kabupaten Soppeng.

2. Hadirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ini menjadi tugas penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Soppeng untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa dan masyarakat desa.
3. Adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di setiap desa, dimana tugas pokok dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) adalah sebagai pelopor, penggerak, pelaksana teknis, perencanaan partisipatif dan mitra kerja kepala desa, BPD, LPM dan Lembaga Desa lainnya.
4. Masih adanya desa yang belum membentuk BUMDES,
5. Adanya kepala desa dan BPD yang habis masa jabatannya

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD tahun 2017 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2018.

Berikut adalah **tabel 2.3.** rewiuw terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017 :

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng mengacu pada program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada, Rencana Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng juga disusun berdasarkan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Soppeng tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholders.

Berikut **tabel 2.4** Review terhadap usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2017 :

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional

Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan disebut dengan NAWACITA sebagai agenda prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya “

Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”,

tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;

6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu:

1. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui:
 - a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa ;
 - b. Menyusun peraturan pelaksanaan perundangundangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ;
 - c. Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa.
2. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
3. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
4. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
5. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
7. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrast ruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
8. Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah.

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat pada Strategi ke-1, ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah mengeluarkan 5 (lima) produk Peraturan Menteri, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Dinas Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan Tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing Misi.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng dalam rangka mencapai Visi dan Misi adalah :

Tujuan

Berdasarkan Visi Dan Misi BPMD maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
- 2. Mengembangkan berbagai jenis kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat dan turut mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna yang efektif.
- 3. Meningkatkan kapasitas aparat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- 4. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Desa.
- 5. Meningkatkan Kinerja Aparatur

Tabel 3.1

No	Tujuan	Indikator	Target Tahun 2018
1.	Meningkatkan kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan serta turut menjaga atau melestarikan budaya lokal.	Persentase peran aktif lembaga kemasyarakatan	73 %
2.	Mengembangkan berbagai jenis kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat dan turut mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna yang efektif.	Persentase pemberdayaan potensi ekonomi desa	40,82 %

3.	Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.	Jumlah aparat pemerintahan desa yang mempunyai kapasitas	196 Orang
4.	Meningkatkan perencanaan pembangunan desa	Jumlah desa yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan	49 Desa
5.	Meningkatkan Kinerja Aparatur	Persentase aparat yang berkinerja sangat baik	100%

Sasaran

Untuk mencapai tujuan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng ditetapkan Lima sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng pada tahun 2016-2021 Sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
2. Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
3. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
4. Meningkatnya Perencanaan dalam Pembangunan Desa
5. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan
6. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor

Tabel 3.2

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2018
1	Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kelembagaan masyarakat	73 %
2	Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa	Jumlah unit bumdes yang aktif	40,82 %
3	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	Jumlah aparat desa yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	196 Orang
4	Meningkatnya Perencanaan dalam Pembangunan Desa	Jumlah desa yang memiliki RKPDesa/APBDesa	49 Desa
5	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100%
6	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	73 %

3.4. Program dan kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan SKPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan akata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijaksanaan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.

1. RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Provinsi.
2. Adanya Visi dan Misi Bupati Soppeng.
3. RPJMD dan RKPD Kabupaten Soppeng.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sesuai Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng, maka program dan Kegiatan Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.
3. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor.
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor.
5. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan.
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.
8. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
9. Penyediaan Jasa Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
2. Pengadaan mebeleur
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

c. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

1. Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Penyusunan Laporan keuangan semesteran.
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kel.

1. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).
2. Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang
3. Fasilitasi 10 Program PKK
4. Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
5. Pencanangan/Penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
6. PENCEPATAN Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
7. Evaluasi tingkat Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan

- f. **Program Perencanaan Pembangunan Desa**
 - 1. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa
 - 2. Fasilitasi Penyusunan RKPDesa dan APBDesa
 - 3. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel.
- g. **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**
 - 1. Pembinaan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 - 2. Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2).
 - 3. Monev Pengelolaan dan Pengembangan Bumdes
 - 4. Pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional
- h. **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**
 - 1. Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan Keuangan Desa
 - 2. Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Dana ADD.
 - 3. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa & BPD.
 - 4. Fasilitasi Penyusunan APBDesa.
 - 5. Fasilitasi Penyusunan peraturan Desa tentang Desa.
 - 6. Penyusunan Produk Hukum terkait dengan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa .

Rumusan perubahan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2017 dan prakiraan Maju Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini :

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng tahun 2018 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Periode 2016-2021, dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2017 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2017.

Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait Swasta, Stakeholders dan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Soppeng pada umumnya.

Demikianlah Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng Tahun 2017 ini dibuat, semoga bermanfaat dan menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan ditahun mendatang.-

Watansoppeng, 30 Agustus 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SOPPENG



ANDI AGUS NONGKI, S.IP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19710817 199101 1 001

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2	07	01	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kel.	LPM Aktif		100%	451.000.000		100%	460.000.000	
		01	Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)	Jumlah anak sekolah yang diberikan makanan tambahan	Kab. Soppeng	210 anak	28.000.000	APBD Kab.		220 anak	29.000.000
		02	Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang	Keberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan baruga sayang	Kab. Soppeng	5 D/K	16.000.000	APBD Kab.		5 D/K	17.000.000
		03	Fasilitasi 10 Program Pokok PKK	Jumlah Desa/Keluurahan yang di fasilitasi	Kab. Soppeng	70 D/K	200.000.000	APBD Kab.		70 D/K	200.000.000
		04	Peningkatan sarana dan prasarana baruga sayang (pemeliharaan inventaris)	Jumlah bangunan baruga sayang	Kab. Soppeng	5 baruga	25.000.000	APBD Kab.		5 baruga	26.000.000
		05	Pelatihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pengurus Lembaga kemasyarakatan	Kab. Soppeng	70 D/K	20.000.000	APBD Kab.		70 D/K	21.000.000
		06	Pencanangan/Penutupan Bulan Bakti Gotong royong Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan pelaksanaan BBGRM	Kab. Soppeng	1 kali	31.000.000	APBD Kab.		1 kali	31.000.000,00
		07	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan data dasar PPSP	Kab. Soppeng	1 dok	26.000.000	APBD Kab.		1 dok	27.000.000
		08	Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kab. Soppeng	1 D/ 1 K	105.000.000	APBD Kab.		1 D/ 1 K	109.000.000
2	07	02	Program Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa menyusun RPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa tepat waktu		49 Desa	132.500.000			49 Desa	134.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	01	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa Yang melaksanakan Pramusrembang dan Musrembangdes	Kab. Soppeng	49 Desa	56.500.000	APBD Kab.		49 Desa	57.000.000
	02	Fasilitasi Penyusunan RKPDesa dan APBDesa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan rkpd/apbdesa	Kab. Soppeng	49 Desa	42.500.000	APBD Kab.		49 Desa	43.000.000
	03	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel.	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan profil Desa/Kel.	Kab. Soppeng	70 Desa/Kel	33.500.000	APBD Kab.		70 Desa/Kel	34.000.000
2	07	03	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat		51,02%	198.000.000		61,22%	213.000.000
	01	Pembinaan Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Adm pendamping Teknis dan Tenaga ahli pemberdayaan	Kab. Soppeng	69 Pdpjg	35.000.000	APBD Kab.		69 Pdpjg	36.000.000
	02	Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2)	Jumlah masyarakat masginal yang dibina	Kab. Soppeng	113 klp	3.000.000	APBD Kab.		113 klp	3.000.000
	03	Fasilitasi Penyusunan Perdes Tentang Bumdes	Pemahaman aparat ttg produk hukum dengan tesusnya perdes ttg desa	Kab. Soppeng	1 kali	20.000.000	APBD Kab.		1 kali	21.000.000
	04	Sosialisasi Posyantekdes (pos pelayanan TTG)	Jumlah pemahaman aparat kecamatan ttg TTG	Kab. Soppeng	-	-	-		-	-
	05	Bimtek pengembangan kewirausahaan bumdes	Jumlah pengelola bumdes yang dibimtek	Kab. Soppeng	30 org	26.000.000	APBD Kab.		30 org	27.000.000
	06	Monev pengelolaan dan pengembangan bumdes	Jumlah bumdes yang terbina	Kab. Soppeng	20 Desa	34.000.000	APBD Kab.		30 Desa	44.000.000
	07	Pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional	ikut sertanya soppeng dalam ajang TTG	Provinsi/Nasional	10 org	80.000.000	APBD Kab.		10 org	82.000.000
2	07	04	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah aparat pemerintah desa yang difasilitasi		245 Org	827.000.000		294Org	238.000.000
	01	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparat pemerintah desa dengan pelaksanaan bimtek keuangan desa	Kab. Soppeng	148 Org	80.000.000	APBD Kab.		148 Org	81.000.000
	02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Desa yang dievaluasi	-	-	-	-		-	-
	03	Pembinaan dan fasilitasi penggunaan Dana ADD/DAD	Jumlah yang difasilitasi pengelolaan dana ADD/DAD	Kab. Soppeng	49 Desa	46.000.000	APBD Kab.		49 Desa	47.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	04	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD	Jumlah Kepala Desa dan BPD yang difasilitasi	Kab. Soppeng	27 Desa	600.000.000	APBD Kab.		BPD	5.000.000
	05	Fasilitasi Penyusunan APBDesa	Jjumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan APBDesa	Kab. Soppeng	49 Desa	15.500.000	APBD Kab.		49 Desa	17.000.000
	06	Fasilitasi penyusunan peraturan Desa tentang Desa	Jumlah ttg produk hukum ttg Desa	Kab. Soppeng	49 Desa	17.500.000	APBD Kab.		49 Desa	19.000.000
	07	Fasilitasi Penyusunan LPPDesa	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan LPPD	-	-	-	-		-	-
	08	Penyusunan Produk Hukum terkait dengan desa	Jumlah Produk Hukum ttg desa	DPMD Kab. Soppeng	2 produk hukum	68.000.000	APBD Kab.		2 produk hukum	69.000.000
x	xx	xx	Program Pelayanan Perkantoran	%Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu		99,75%	713.100.000		99,76%	724.100.000
	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran pelayanan Komunikasi Telepon, Internet, Sumber Air Dan Listrik	DPMD Kab. Soppeng	12 bulan	32.000.000	APBD Kab.		12 bulan	33.000.000
	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pembayaran Jasa Asuransi kendaraan Dinas, perpanjangan STNK Kendaraan dinas operasional	DPMD Kab. Soppeng	6 unit	2.750.000	APBD Kab.		6 unit	2.750.000
	05	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan kantot dengan luas bangunan 50 M2	DPMD Kab. Soppeng	150 M2	14.000.000	APBD Kab.		150 M2	15.000.000
	06	Penyediaan Komponen Instasi Listrik	Jumlah kebutuhan alat listrik	DPMD Kab. Soppeng	6 jenis	3.500.000	APBD Kab.		6 jenis	4.000.000
	05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	DPMD Kab. Soppeng	3 Jenis	1.700.000	APBD Kab.		3 Jenis	2.000.000
	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	DPMD Kab. Soppeng	10 Exp.	7.000.000	APBD Kab.		10 Exp.	7.000.000
	09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik kantor/tabung gas	DPMD Kab. Soppeng	12 bulan	2.000.000	APBD Kab.		12 bulan	2.200.000
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksnanya pelayanan kantor dengan perjalanan dinas yang dilakukan dan meningkatnya	DPMD Kab. Soppeng	12 bulan	383.150.000	APBD Kab.		12 bulan	383.150.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tertindaknya pelayan administrasi perkantoran dan keuangan	DPMD Kab. Soppeng	12 bulan	195.000.000	APBD Kab.		12 bulan	200.000.000
	12	Penyediaan Jasa Perkantoran	Tertindaknya jasa perkantoran	DPMD Kab. Soppeng	12 bulan	72.000.000	APBD Kab.		12 bulan	75.000.000
x	xx	xx	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana Prasarana perkantoran		96,80%	159.000.000		97,00%	155.000.000
	08	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	DPMD Kab. Soppeng	6 buah	20.000.000	APBD Kab.		6 buah	20.000.000
	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Kerja PNS	DPMD Kab. Soppeng	5 buah	20.000.000	APBD Kab.		5 buah	20.000.000
	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	DPMD Kab. Soppeng	10 bh	25.000.000	APBD Kab.		10 bh	25.000.000
	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	DPMD Kab. Soppeng	6 unit	60.000.000	APBD Kab.		6 unit	50.000.000
	18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor	DPMD Kab. Soppeng	20 jenis	17.000.000	APBD Kab.		20 jenis	20.000.000
	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	DPMD Kab. Soppeng	20 jenis	17.000.000	APBD Kab.		20 jenis	20.000.000
x	xx	xx	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase PNS berkinerja baik		93%	42.000.000		94%	44.000.000
	09	Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Tertindaknya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	DPMD Kab. Soppeng	70%	42.000.000	APBD Kab.		80%	44.000.000
x	xx	xx	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		99,94%	17.320.000		99,95%	17.320.000
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan RKA,DPA,Renja,Lakip dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	DPMD Kab. Soppeng	5 dok.	10.000.000	APBD Kab.		5 dok.	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Efektifnya pengelolaan data penyusunan laporan keuangan semesteran	DPMD Kab. Soppeng	1 dok.	3.920.000	APBD Kab.		1 dok.	3.920.000
	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	DPMD Kab. Soppeng	1 dok.	3.400.000	APBD Kab.		1 dok.	3.400.000

TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017
KABUPATEN SOPPENG

Nama SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Cpaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017		Catatan		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)	12		
2	07	01	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kel.	LPM Aktif				100%					
		01	Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)	Jumlah anak sekolah yang diberikan makanan tambahan	1.350	0		200	200	100,00%	200	400	29,63%
		02	Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang	Keberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan baruga sayang	25	0		11	5	45,45%	11	16	64,00%
		03	Fasilitasi 10 Program Pokok PKK	Jumlah Desa/Kelurahan yang di fasilitasi	350	0		70	70	100,00%	70	140	40,00%
		04	Peningkatan sarana dan prasarana baruga sayang (pemeliharaan inventaris)	Jumlah bangunan baruga sayang	25	0		0	0	0,00%	0	0	0,00%
		05	Pelatihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pengurus Lembaga kemasyarakatan	350	0		0	0	0,00%	0	0	0,00%
		06	Pencanangan/Penutupan Bulan Bakti Gotong royong Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan pelaksanaan BCGRM	5	0		1	1	100,00%	1	2	40,00%
		07	PercepatanPembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan data dasar PPSP	5	0		1	1	100,00%	1	2	40,00%
		08	Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 Desa / 1 Kel	0		1 Desa / 1 Kel	1 Desa / 1 Kel	100%	1 Desa / 1 Kel	1 Desa / 1 Kel	1 Desa / 1 Kel
2	07	02	Program Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa menyusun RPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa tepat waktu				49 Desa			49 Desa		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Cpaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017		Catatan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
	01	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa Yang melaksanakan Pramusrenbang dan Musrenbangdes	245	0	0	0	0,00%	49	49	20,00%	
	02	Fasilitasi Penyusunan RKPDesa dan APBDesa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan rkp/apbdesa	49	0	0	0	0,00%	49	49	100,00%	
	03	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel.	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan profil Desa/Kel.	70	0	70	49	70,00%	70	119	170,00%	
2	07	03	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat								
	01	Pembinaan Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Adm pendamping Teknis dan Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat	69	0	69	69	100,00%	69	138	200,00%	
	02	Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2)	Jumlah masyarakat masginal yang dibina	115	0	113	113	100,00%	113	226	196,52%	
	03	Fasilitasi Penyusunan Perdes Tentang Bumdes	Pemahaman aparat ttg produk hukum dengan tesunnya perdes ttg desa	1	0	1	1	100,00%	0	1	100,00%	
	04	Sosialisasi Posyantekdes (pos pelayanan TTG)	Jumlah pemahaman aparat kecamatan ttg TTG	70	0	70	70	100,00%	0	70	100,00%	
	05	Bimtek pengembangan kewirausahaan bumdes	Jumlah pengelola bumdes yang dibimtek	30	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	06	Monev pengelolaan dan pengembangan bumdes	Jumlah bumdes yang terbina	35	0	0	0	0,00%	49	49	140,00%	
	07	Pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional	ikut sertanya soppeng dalam ajang TTG	10	0	0	0	0,00%	1	1	10,00%	
2	07	04	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah aparat pemerintah desa yang difasilitasi								
	01	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparat pemerintah desa dengan pelaksanaan bimtek keuangan desa	888	0	148	148	100,00%	148	296	33,33%	
	02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Desa yang dievaluasi	49	0	49	49	100,00%	0	49	100,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Cpaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017		Catatan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
	03	Pembinaan dan fasilitasi penggunaan Dana ADD/DAD	Jumlah yang dipasilitasi pengelolaan dana ADD/DAD	245	0	49	49	100,00%	49	98	40,00%	
	04	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD	Jumlah Kepala Desa dan BPD yang difasilitasi	42	0	12	12	100,00%	0	12	28,57%	
	05	Fasilitasi Penyusunan APBDesa	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan APBDesa	49	0	49	49	100,00%	49	98	200,00%	
	06	Fasilitasi penyusunan peraturan Desa tentang Desa	Jumlah ttg produk hukum ttg Desa	49	0	49	49	100,00%	0	49	100,00%	
	07	Fasilitasi Penyusunan LPPDesa	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan LPPD	49	0	49	49	100,00%	0	49	100,00%	
	08	Penyusunan Produk Hukum terkait dengan desa	Jumlah Produk Hukum ttg desa	12	0	2	2	100,00%	2	4	33,33%	
x	xx	xx	Program Pelayanan Perkantoran	%Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu		99,73%		99,74%				
	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran pelayanan Komunikasi Telepon, Internet, Sumber Air Dan Listrik	60	0	12	11	91,67%	12	23	38,33%	
	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pembayaran Jasa Asuransi kendaraan Dinas, perpanjangan STNK Kendaraan dinas operasional	30	0	6	6	100,00%	6	12	40,00%	
	05	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan kantot dengan luas banunan 50 M2	250	0	50	50	100,00%	150	200	80,00%	
	06	Penyediaan Komponen Instasi Listrik	Jumlah kebutuhan alat listrik	30	0	6	6	100,00%	6	12	40,00%	
	05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	15	0	3	3	100,00%	0	3	20,00%	
	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	50	0	10	10	100,00%	10	20	40,00%	
	09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik kantor/tabung gas	60	0	12	12	100,00%	11	23	38,33%	
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya pelayanan kantor dengan perjalanan dinas yang dilakukan dan meningkatnya kemampuan pns	60	0	12	12	100,00%	12	24	40,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Cpaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017		Catatan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tertindakannya pelayan administrasi perkantoran dan keuangan	60	0	12	12	100,00%	12	24	40,00%	
	12	Penyediaan Jasa Perkantoran	Tertindakannya jasa perkantoran	60	0	12	12	100,00%	12	24	40,00%	
x	xx	xx	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana Prasarana perkantoran								
	08	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	30	0	6	6	100,00%	27	33	110,00%	
	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Kerja PNS	25	0	5	5	100,00%	6	11	44,00%	
	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	57	0	0	0	0,00%	17	17	29,82%	
	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	30	0	6	6	100,00%	6	12	40,00%	
	18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor	98	0	3	3	100,00%	0	3	3,06%	
	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	98	0	4	4	100,00%	14	18	18,37%	
x	xx	xx	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase PNS berkinerja baik								
	09	Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Tertindakannya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	100	0	50	50	100,00%	60	110	110,00%	
x	xx	xx	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu								
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan RKA, DPA, Renja, Lakip dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	25	0	5	5	100,00%	5	10	40,00%	
	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Efektifnya pengelolaan data penyusunan laporan keuangan semesteran	5	0	1	1	100,00%	1	2	40,00%	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Cpaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5	0	1	1	100,00%	1	2	40,00%	

Tabel 2.2
REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD

NO	INDIKATOR	TARGET SPW IKK/ STANDAR NASIONAL/ INTERNASIONAL	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TUJUAN										
1	Persentase Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan	-	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	80,00%	-	90,00%	95,00%	
2	Persentase pemberdayaan potensi ekonomi Desa	-	30,61%	40,82%	51,02%	61,22%	30,61%	-	51,02%	61,22%	
3	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mempunyai kapasitas	-	147 Org	196 Org	245 Org	294 Org	147 Org	-	245 Org	294 Org	
4	Jumlah Desa yang berpartisipasi dalam perencanaan membangun	-	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	-	49 Desa	49 Desa	
	SASARAN										
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam kelembagaan masyarakat	-	70,00%	73,00%	79,00%	81,00%	70,00%	-	79,00%	81,00%	
2	Jumlah UNIT BUMDes yang Aktif	-	30,61%	40,82%	51,02%	61,22%	30,61%	-	100,00%	100,00%	
3	Jumlah aparat desa yg memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	-	147 Org	196 Org	245 Org	294 Org	147 Org	-	245 Org	294 Org	
4	Jumlah Desa yang memiliki RKPDesa/APBDesa	-	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	49 Desa	-	49 Desa	49 Desa	
5	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	-	70 D/K	70 D/K	70 D/K	70 D/K	70 D/K	-	70 D/K	70 D/K	
6	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	14 D/K	14 D/K	14 D/K	14 D/K	14 D/K	-	14 D/K	14 D/K	
7	LPM Berprestasi	-	3 bh	3 bh	3 bh	3 bh	3 bh	-	3 bh	3 bh	
8	PKK aktif	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
9	Posyandu aktif	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
10	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	-	15%	20%	25%	30%	15%	-	25%	30%	

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kel.		LPM Aktif	100%	334.746.000	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kel.		LPM Aktif	100%	334.746.000	
	- Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)	Kab. Soppeng	Jumlah anak sekolah yang diberikan makanan tambahan	200 anak	25.595.000	Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)	Kab. Soppeng	Jumlah anak sekolah yang diberikan makanan tambahan	200 anak	25.595.000	
	- Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang	Kab. Soppeng	Keberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan baruga sayang	11 D/K	14.030.000	Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang	Kab. Soppeng	Keberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan baruga sayang	11 D/K	14.030.000	
	- Fasilitasi 10 Program Pokok PKK	Kab. Soppeng	Jumlah Desa/Keluurahan yang di fasilitasi	70 D/K	74.750.000	Fasilitasi 10 Program Pokok PKK	Kab. Soppeng	Jumlah Desa/Keluurahan yang di fasilitasi	70 D/K	74.750.000	
	- Peningkatan sarana dan prasarana baruga sayang (pemeliharaan inventaris)	Kab. Soppeng	Jumlah bangunan baruga sayang		0	Peningkatan sarana dan prasarana baruga sayang (pemeliharaan inventaris)	Kab. Soppeng	Jumlah bangunan baruga sayang		0	
	- Pelatihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Soppeng	Jumlah pengurus Lembaga kemasyarakatan		0	Pelatihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Soppeng	Jumlah pengurus Lembaga kemasyarakatan		0	
	- Pencanangan/Penutupan Bulan Bakti Gotong royong Masyarakat	Kab. Soppeng	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan pelaksanaan BBGRM	1 kali	21.326.000	Pencanangan/Penutupan Bulan Bakti Gotong royong Masyarakat	Kab. Soppeng	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan pelaksanaan BBGRM	1 kali	21.326.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Kab. Soppeng	partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan data dasar PPSP	1 dok	2.375.000	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Kab. Soppeng	partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan data dasar PPSP	1 dok	2.375.000	
	- Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Kab. Soppeng	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 D/ 1 K	196.670.000	Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Kab. Soppeng	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 D/ 1 K	196.670.000	
2	Program Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Desa menyusun RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa tepat waktu	49 Desa	69.085.000	Program Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Desa menyusun RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa tepat waktu	49 Desa	69.085.000	
	- Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Soppeng	Jumlah Desa Yang melaksanakan Pramusrembang dan Musrembangdes	49 Desa	3.250.000	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Soppeng	Jumlah Desa Yang melaksanakan Pramusrembang dan Musrembangdes	49 Desa	3.250.000	
	- Fasilitasi Penyusunan RKPDesa dan APBDDesa	Kab. Soppeng	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan rkpd/apbdesa	49 Desa	59.885.000	Fasilitasi Penyusunan RKPDesa dan APBDDesa	Kab. Soppeng	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan rkpd/apbdesa	49 Desa	59.885.000	
	- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel.	Kab. Soppeng	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan profil Desa/Kel.	70 Desa/Kel	5.950.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel.	Kab. Soppeng	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan profil Desa/Kel.	70 Desa/Kel	5.950.000	
3	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat	40,82%	12584600000%	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat	40,82%	12584600000%	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pembinaan Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan	Kab. Soppeng	Jumlah Adm pendamping Teknis dan Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat	69 Pdpq	75.976.000	Pembinaan Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan	Kab. Soppeng	Jumlah Adm pendamping Teknis dan Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat	69 Pdpq	75.976.000	
	- Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2)	Kab. Soppeng	Jumlah masyarakat masginal yang dibina	113 klp	2.960.000	Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2)	Kab. Soppeng	Jumlah masyarakat masginal yang dibina	113 klp	2.960.000	
	Sosialisasi Posyantekdes (pos pelayanan TTG)	Kab. Soppeng	Jumlah pemahaman aparat kecamatan ttg		0					0	
	- Fasilitasi Penyusunan Perdes Tentang Bumdes	Kab. Soppeng	Pemahaman aparat ttg produk hukum dengan tesusnya perdes ttg desa		0	Fasilitasi Penyusunan Perdes Tentang Bumdes	Kab. Soppeng	Pemahaman aparat ttg produk hukum dengan tesusnya perdes ttg desa		0	
	- Bimtek pengembangan kewirausahaan bumdes	Kab. Soppeng	Jumlah pengelola bumdes yang dibimtek		0	Bimtek pengembangan kewirausahaan bumdes	Kab. Soppeng	Jumlah pengelola bumdes yang dibimtek		0	
	- Monev pengelolaan dan pengembangan bumdes	Kab. Soppeng	Jumlah bumdes yang terbina	49 Desa	26.260.000	Monev pengelolaan dan pengembangan bumdes	Kab. Soppeng	Jumlah bumdes yang terbina	49 Desa	26.260.000	
	- Pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional	Provinsi/Nasional	ikut sertanya soppeng dalam ajang TTG	1 kali	20.650.000	Pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional	Provinsi/Nasional	ikut sertanya soppeng dalam ajang TTG	1 kali	20.650.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		Jumlah aparat pemerintah desa yang difasilitasi	196 Org	222.082.000	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		Jumlah aparat pemerintah desa yang difasilitasi	196 Org	222.082.000	
	- Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Soppeng	Jumlah aparatur pemerintah desa dengan pelaksanaan bimtek keuangan desa	148 Org	79.950.000	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Soppeng	Jumlah aparatur pemerintah desa dengan pelaksanaan bimtek keuangan desa	148 Org	79.950.000	
	- Pembinaan dan fasilitasi penggunaan Dana ADD/DAD	Kab. Soppeng	Jumlah yang dipasilitasi pengelolaan dana ADD/DAD	49 Desa	45.540.000	Pembinaan dan fasilitasi penggunaan Dana ADD/DAD	Kab. Soppeng	Jumlah yang dipasilitasi pengelolaan dana ADD/DAD	49 Desa	45.540.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Fasilitas Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD	Kab. Soppeng	Jumlah Kepala Desa dan BPD yang difasilitasi	BPD	3.725.000	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD	Kab. Soppeng	Jumlah Kepala Desa dan BPD yang difasilitasi	BPD	3.725.000	
	- Fasilitas Penyusunan APBDesa	Kab. Soppeng	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan APBDesa	49 Desa	12.025.000	Fasilitas Penyusunan APBDesa	Kab. Soppeng	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan APBDesa	49 Desa	12.025.000	
	- Fasilitas penyusunan peraturan Desa tentang Desa	Kab. Soppeng	Jumlah ttg produk hukum ttg Desa		13.777.000	Fasilitas penyusunan peraturan Desa tentang Desa	Kab. Soppeng	Jumlah ttg produk hukum ttg Desa		13.777.000	
	- Penyusunan Produk Hukum terkait dengan desa	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah Produk Hukum ttg desa	2 produk hukum	67.065.000	Penyusunan Produk Hukum terkait dengan desa	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah Produk Hukum ttg desa	2 produk hukum	67.065.000	
5	Program Pelayanan Perkantoran		%Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu	99,74%	724.296.000	Program Pelayanan Perkantoran		%Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu	99,74%	724.296.000	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah Pembayaran pelayanan Komunikasi Telepon, Internet, Sumber Air Dan Listrik	12 bulan	30.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah Pembayaran pelayanan Komunikasi Telepon, Internet, Sumber Air Dan Listrik	12 bulan	30.200.000	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah pembayaran Jasa Asuransi kendaraan Dinas, perpanjangan STNK Kendaraan dinas operasional	6 unit	2.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah pembayaran Jasa Asuransi kendaraan Dinas, perpanjangan STNK Kendaraan dinas operasional	6 unit	2.750.000	
	- Penyediaan Jasa kebersihan kantor	DPMD Kab. Soppeng	Meningkatnya kebersihan kantot dengan luas bangunan 50 M2	150 M2	14.400.000	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	DPMD Kab. Soppeng	Meningkatnya kebersihan kantot dengan luas bangunan 50 M2	150 M2	14.400.000	
	- Penyediaan Komponen Instasi Listrik	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah kebutuhan alat listrik	6 jenis	1.620.000	Penyediaan Komponen Instasi Listrik	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah kebutuhan alat listrik	6 jenis	1.620.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga kantor		0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga kantor		0	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	10 Exp.	7.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	10 Exp.	7.000.000	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah Logistik kantor/tabung gas	11 bulan	1.760.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah Logistik kantor/tabung gas	11 bulan	1.760.000	
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	DPMD Kab. Soppeng	Terlaksananya pelayanan kantor dengan perjalanan dinas yang dilakukan dan meningkatnya kemampuan pns	12 bulan	383.150.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	DPMD Kab. Soppeng	Terlaksananya pelayanan kantor dengan perjalanan dinas yang dilakukan dan meningkatnya kemampuan pns	12 bulan	383.150.000	
	- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	DPMD Kab. Soppeng	Terlaksananya pelayan administrasi perkantoran dan keuangan	12 bulan	211.416.000	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	DPMD Kab. Soppeng	Terlaksananya pelayan administrasi perkantoran dan keuangan	12 bulan	211.416.000	
	- Penyediaan Jasa Perkantoran	DPMD Kab. Soppeng	Terlaksananya jasa perkantoran	12 bulan	72.000.000	Penyediaan Jasa Perkantoran	DPMD Kab. Soppeng	Terlaksananya jasa perkantoran	12 bulan	72.000.000	
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana Prasarana perkantoran	96,50%	156.886.250	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana Prasarana perkantoran	96,50%	156.886.250	
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	27 Buah	51.300.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	27 Buah	51.300.000	
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Kerja PNS	6 buah	48.500.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Kerja PNS	6 buah	48.500.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pengadaan mebeleur	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah mebeleur yang tersedia	17 bh	40.800.000	Pengadaan mebeleur	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah mebeleur yang tersedia	17 bh	40.800.000	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6 unit	10.486.250	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6 unit	10.486.250	
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor		0	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor		0	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	14 jenis	5.800.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	14 jenis	5.800.000	
7	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur		Persentase PNS berkinerja baik	92%	40.000.000	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur		Persentase PNS berkinerja baik	92%	40.000.000	
	- Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	DPMD Kab. Soppeng	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	60%	40.000.000	Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	DPMD Kab. Soppeng	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	60%	40.000.000	
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan		Persentase Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	99,93%	14.900.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan		Persentase Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	99,93%	14.900.000	
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah Penyusunan RKA,DPA,Renja,Lakip dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	5 dok.	7.250.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD Kab. Soppeng	Jumlah Penyusunan RKA,DPA,Renja,Lakip dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	5 dok.	7.250.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	DPMD Kab. Soppeng	Efektifnya pengelolaan data penyusunan laporan keuangan semesteran	1 dok.	3.850.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	DPMD Kab. Soppeng	Efektifnya pengelolaan data penyusunan laporan keuangan semesteran	1 dok.	3.850.000	
	- Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	DPMD Kab. Soppeng	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 dok.	3.800.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	DPMD Kab. Soppeng	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 dok.	3.800.000	

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Dana	BESARNYA VOLUME	CATATAN HASIL REVIEW
1	2	3	4		5	6
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kel		LPM Aktif			
	- Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)	Kab. Soppeng	Jumlah anak sekolah yang diberikan makanan tambahan	-	70 Desa/Kel	
	- Fasilitasi 10 program PKK	Kab. Soppeng	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi	-	70 Desa/Kel	
2	Program Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Desa RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	-		
	- Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa	Kab. Soppeng	Jumlah desa yang melaksanakan pramusrenbang dan musrenbangdes	-	70 Desa/Kel	
	- Fasilitasi penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa	Kab. Soppeng	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa	-	49 Desa	
	- Fasilitasi penyusunan profil desa	Kab. Soppeng	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan profil desa/kel	-	70 Desa/Kel	
3	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
	- Pembinaan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Kab. Soppeng	Jumlah Administrasi pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat	-	49 Desa	
	- Monev Pengelolaan dan Pengembangan Bumdes	Kab. Soppeng	Jumlah Bumdes yang terbina		49 Desa	
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahn Desa		Jumlah Aparat Pemerintah Desa Yang difasilitasi			
	- Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Kab. Soppeng	Jumlah aparatur pemerintah desa dengan pelaksanaan bimtek keuangan desa	-	49 Desa	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Dana	BESARNYA VOLUME	CATATAN HASIL REVIEW
-	Pembinaan & fasilitasi pengelolaan dana ADD dan DAD	Kab. Soppeng	Jumlah yang difasilitasi pengelolaan dana ADD/DAD	-	49 Desa	
-	Fasilitasi pemilihan kepala desa dan BPD	Kab. Soppeng	Jumlah kepala desa dan BPD yang difasilitasi	-	49 Desa	
-	Fasilitasi penyusunan APBDesa	Kab. Soppeng	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan APBDesa	-	49 Desa	
-	Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang desa	Kab. Soppeng	Jumlah tentang produk hukum tentang desa	-	49 Desa	